

PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK DI DISTRIK YALENGGA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Yonesius Maarisit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Partisipasi politik generasi muda dianggap sangat menentukan kemajuan bangsa, bukan hanya karena generasi muda merupakan generasi penerus bangsa akan tetapi jika tanpa adanya potensi dan kreativitas generasi muda, maka pembangunan yang diusahakan oleh pemerintah tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Dalam pasal 7, Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan kepada pemerintah daerah baik Gubernur/Bupati dan/atau Walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan pada pembangunan. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut maka sangat diperlukan peran aktif dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat termasuk didalamnya generasi muda sebagai penerus tongkat estafet cita-cita dan perjuangan bangsa dalam suatu tindakan nyata sehingga setiap generasi muda perlu dipersiapkan dan dibekali agar memiliki kesadaran politik yang benar serta memiliki potensi, kreatifitas dan produktif.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci : *Partisipasi Politik, Generasi Muda, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber insan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus-menerus dalam kerangka pembangunan nasional. Pembinaan dan pengembangan generasi muda merupakan tanggung jawab semua pihak.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, generasi muda selalu di tuntut berpartisipasi aktif sesuai dengan kondisi lingkungan objektif dan subjektifnya. Generasi muda harus menjadi subjek yang

ikut menentukan masa depan bangsa dan member warna dan suasana demokrasi. Ini semua bukan adanya *success story* dalam kesejahteraan bangsa tetapi merupakan tanggung jawab generasi muda terhadap nasib bangsanya.

Era reformasi telah menggugah kesadaran baru sebagian besar generasi muda sehingga gagasan-gagasan baru mulai di denguungkan baik dilihat dari sisi nilai maupun dalam bentuk pranata. Maka untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Distrik Yalengga, organisasi kepemudaan harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Namun peran dan eksistensi organais tersebut

sangat tergantung pada profesionalisme serta kemandirian pengelolaan organisasi tersebut.

Pentingnya peran dan potensi generasi muda dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa, maka pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan haruslah diartikan sebagai keseluruhan upaya pendidikan politik baik dan sadar, berencana, terarah, teratur, berkesinambungan serta bertanggung jawab.

Generasi muda selaku penerus bangsa harus memiliki ruang yang luas dalam mengaktualisasikan partisipasi politik.

Pada era reformasi, peran dan eksistensi generasi muda dalam partisipasi politik diharapkan dapat semakin berkembang dan bebas mengemukakan artikulasi politiknya tanpa harus mengalami tekanan baik dari gerakan dan gagasan seperti yang terjadi dan dialami pada rezim kekuasaan sebelumnya.

Oleh karena itu kebijakan nasional dengan *political will*-nya tidak lagi melakukan diskriminasi, sehingga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi politik dalam menunjang pembangunan politik bahkan pembangunan nasional. Disamping itu, usaha pemerataan pembangunan juga menunjang peningkatan partisipasi politik generasi muda.

Partisipasi politik generasi muda tidak hanya bisa dilihat dari keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, bahkan Pilkadaes, tetapi juga dari sisi kesadaran bahwa gagasan, ide, pandangan mereka secara politik mengenai bagaimana bangsa ini harus dibangun dan dijalankan dengan satu tujuan yang jelas yakni kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Partisipasi politik generasi muda bukan sekedar aksi politik semata, melainkan pengembangan kesadaran politik masyarakat secara berkesinambungan dan berkeadilan. Artinya bahwa partisipasi politik generasi muda harus mengembangkan misi pembangunan politik dengan cara meningkatkan kesadaran, kewajiban serta tanggung jawab politik bagi bangsa dan Negara.

Partisipasi politik harus sejalan dengan cita-cita nasional, dalam hubungan ini diharapkan generasi muda ikut mengambil bagian secara aktif dalam pembangunan politik.

Melihat kondisi yang terjadi dimasyarakat bahwa partisipasi aktif generasi muda yang ada di Distrik Yalengga masih rendah. Hasil survey awal menunjukkan bahwa indikator yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda dalam pembangunan politik yakni karena tingkat pendidikan

yang masih rendah, pengetahuan tentang politik yang masih kurang, sikap apatis dari mereka sebab mereka lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonom keluarga.

Hal ini menyebabkan kurangnya pembangunan politik di masyarakat secara luas. Pemahaman mereka tentang politik hanya pada persoalan menentukan pilihan pada saat pelaksanaan pemilu semata. Maka, dianggap menarik untuk dibahas lebih lanjut sebab hampir sebagian besar daerah terpencil terjadi masalah yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu prinsip *good governance*. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu “*Pars*” yang artinya bagian dan “*Capere*” yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004).

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah Negara demokrasi dan merupakan prasyarat modernisasi dalam politik.

Dengan adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka setiap warga Negara berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi dari tiap-tiap keputusan politik yang dibuat. Sehingga partisipasi politik menurut Hantintong dan Nelson (1994) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif

Partisipasi politik menurut Ndraha (2007) terdiri atas dua bentuk partisipasi :

- a) Partisipasi horizontal, adalah partisipasi sesama warga atau anggota suatu perkumpulan.
- b) Partisipasi vertikal, adalah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan partner atau antara masyarakat sebagai perkumpulan dengan pemerintah.

Didalam menemukan maknanya, maka dalam rumusan partisipasi tersirat tiga gagasan pokok :

- a) Adanya keterlibatan mental dan emosi.
- b) Adanya dorongan untuk melibatkan diri bagi tercapainya tujuan.
- c) Adanya rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan kelompok

Selanjutnya pengertian partisipasi politik menurut Melosky (dalam Budiardjo, 2008) adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat sebagaimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara sukarela dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Budiardjo (2008) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Sebab itu di negara-negara dengan sistem demokrasi, umumnya beranggapan bahwa jika jumlah partisipasi masyarakat banyak akan lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak

warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut diatas dapat dipahami bahwa partisipasi politik adalah penentuan sikap terhadap penentuan keputusan atau kebijakan pemerintah baik dalam menentukan pemimpin pemerintahan ataupun terhadap tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pemecahan masalah negara, yang dilakukan oleh warga negara secara langsung dan/atau tidak langsung, dengan cara-cara tertentu termasuk menggunakan kekerasan (*violence*).

Dalam implementasi partisipasi politik, pasti terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Surbakti (2010) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama*, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. *Kedua*, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen). Artinya bahwa tinggi atau rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti

status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2010).

Sedangkan menurut Weiner partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mas'ood (2009), yaitu sebagai berikut :

- a) Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b) Terjadinya perubahan struktur sosial kelas baru sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas di era industrialisasi dan modernisasi.
- c) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalism membangkitkan tuntutan-tuntutan

untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

- d) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seirng kali untuk mencapai kemenangannya, dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang munculnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa partisipasi politik adalah tentang keikutsertaan seseorang dalam berbagai proses dan tahapan politik, mulai dari penentuan pemimpin negara atau daerah sampai desa, kemudian dalam penyusunan dan penentuan sebuah kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan, sampai pada tahap penilaian kebijakan.

2. Konsep Generasi Muda

Secara umum, generasi muda dapat dikatakan sebagai suatu fase siklus pembentukan kepribadian manusia sebagaimana juga dalma fase-fase lainnya , maka generasi muda ini memiliki cirri sendiri yang mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya (Simanjuntak, B Pasaribu II, 1990: 103).

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 1 ayat (1), secara tegas disebutkan bahwa “Pemuda” adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh tahun)”.

3. Konsep Pembangunan Politik

Pada dasarnya pembangunan politik memiliki kecenderungan tertentu dalam popularisasi ide-ide kemajuan atau tingkat kehidupan kenegaraan yang lebih baik dibandingkan dengan masa lalu, misalnya ketika suatu negara dalam sistem penjajahan maupun dalam fase memilih sistem politik yang sesuai dengan kemerdekaan nasional yang diperoleh. Masyarakat yang dianggap maju menurut teori sosial dan kebudayaan adalah masyarakat yang modern sehingga ciri-ciri sistem politik yang maju ada pada masyarakat dengan taraf hidup yang sudah modern. Dalam memahami konsep pembangunan politik, ada berbagai pendapat berbeda dari masing-masing ahli.

Pye (1991) menjelaskan sepuluh definisi tentang pembangunan politik, yaitu : *pertama*, pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi; *kedua*, pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik

masyarakat industri; *ketiga*, pembangunan politik sebagai modernisasi politik; *keempat*, pembangunan politik sebagai operasi negara-bangsa; *kelima*, pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum; *keenam*, pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa; *ketujuh*, pembangunan politik sebagai pembinaan kehidupan demokrasi; *kedelapan*, pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur; *kesembilan*, pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan; dan *kesepluluh*, pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi. Dari sepuluh konsep tersebut, Pye (1966) merumuskan tiga ciri pokok yang berkaitan dengan pembangunan politik. Ciri pokok yang *pertama* adalah adanya semangat mencapai persamaan (*equality*). Dalam hal ini pembangunan politik berhubungan dengan penyelesaian masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Selain itu, persamaan juga dapat dihubungkan dengan hukum yang bersifat universal dan berlaku untuk semua golongan masyarakat. *Kedua*, berkaitan dengan kapasitas dari suatu sistem politik. Kapasitas sistem yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan sistem politik untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, dan perencanaan yang

berpedoman pada pemikiran yang sistematis. *Ketiga*, adalah diferensiasi dan spesialisasi struktur serta fungsi jabatan-jabatan dan badan-badan pemerintahan. Sehingga jabatan-jabatan dan badan-badan pemerintahan memiliki fungsinya masing-masing yang tersendiri dan terbatas serta adanya integrasi di dalam pemerintahan. Ketiga ciri pembangunan politik menurut tersebut memiliki kesamaan dengan ciri pokok proses modernisasi politik menurut Welch (1966), yakni: *Pertama*, peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, dibarengi dengan penurunan sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional; *Kedua*, diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik; *Ketiga*, peningkatan partisipasi rakyat dalam politik. Dengan kata lain jika kita memahami konsep modernisasi, maka kita juga dapat memahami konsep pembangunan politik.

Modernisasi menurut Pye adalah penyebaran sebuah kebudayaan yang ia sebut sebagai “kebudayaan dunia”. Dalam hal politik, modernisasi dapat diartikan sebagai mendiferensiasikan struktur-struktur politik yang baru, perluasan partisipasi politik, pertumbuhan nasionalisme dan sebagainya. Tujuannya modernisasi dalam bidang politik adalah untuk membangun sebuah kerangka institusi yang tidak kaku namun kuat agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada mereka.

Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pembangunan politik terkait dengan masalah partisipasi massa dan keterlibatan rakyat dalam aktivitas dan proses politik. Aktivitas politik tersebut yang kemudian memberikan dampak perubahan pada sistem politik termasuk didalamnya adalah perubahan pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan maju.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana akan dipaparkan secara deskriptif mengenai partisipasi politik generasi muda dalam pembangunan politik di Distrik Yalengga. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan menggunakan observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*In-Dept Interview*), dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas politik mungkin sangat asing ditelinga masyarakat awam dengan tingkat pendidikan yang rendah apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar generasi muda yang ada di Distrik Yalengga masih kurang menyadari mengenai bagaimana peran pendidikan politik secara dini, akan ikut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran partisipasi politik mereka. Sebagian besar memiliki

pandangan politik yang keliru bahwa partisipasi aktif dari generasi muda hanya dalam hal memilih siapa pemimpin daerah atau pemimpin negara. Dalam hal ini partisipasi politik mereka sebagai warga negara hanya dapat diukur dari pemberian hak politik aktif mereka dalam pemilihan umum.

Mayoritas dari generasi muda belum memiliki pemahaman yang benar mengenai partisipasi politik, bahwa partisipasi politik juga berupa pemberian opini, kritik dan saran terhadap segala tindakan pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan negara/daerah/desa, maupun pada saat pemerintah menjalankan tugas fungsi mereka sebagai penguasa dan wakil rakyat, bahkan dalam mengawasi implementasi kebijakan publik serta kinerja pemerintahan yang ada.

Selain itu, kesadaran bahwa sebagai generasi muda dapat melakukan aksi sosial dengan tujuan memberi pendidikan politik yang benar kepada para orang lanjut usia, dimana kebanyakan dari mereka tidak menggunakan hak politiknya secara independen karena mengalami tekanan dari paradigma pemikiran masa lalu atau dari keluarga dan anak-anaknya.

Rendahnya pengetahuan politik menjadi penyebab utama. Keluarga sebagai agen utama sosialisasi politik patut dipertanyakan eksistensinya dalam memberikan pendidikan politik kepada

anak-anak mereka. Orang tua sebagai orang terdekat sebenarnya dapat dengan mudah mendidik dan menanamkan perilaku yang baik kepada anak-anak mereka dengan memberikan teladan dalam berperilaku yang benar yang secara tidak langsung membentuk karakter yang jujur, bermoral, mengasihi sesama, religius dan lain sebagainya. Namun, peran keluarga dalam membangun hal tersebut belum maksimal sebab rendahnya pengetahuan orang tua.

Disisi lain, melihat realita bahwa sebagian besar anak muda yang ada di Distrik Yalengga hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), memberi penegasan bahwa tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada seberapa banyak pengetahuan yang dimilikinya. Dalam konteks pengetahuan politik, seharusnya sekolah sebagai agen sosialisasi politik ikut menjadi aktor penting dalam memberikan pendidikan politik secara dini kepada generasi-generasi penerus bangsa ini. Sebab, dilingkungan sekolah, seorang guru (pendidik) seharusnya dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, demokrasi, keadilan, moral yang baik, ahklak mulia, gotong royong, serta cinta tanah air. Secara langsung dapat membentuk karakter peserta didik yang demokratis, nasionalis dan berintegritas. Kemudian akan menumbuhkan pemahaman dan pandangan yang benar

tentang politik, yang akan berbanding lurus dengan partisipasi politik mereka.

Melihat realita yang demikian, beberapa tindakan dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat partisipasi politik generasi muda yang ada di Distrik Yalengga.

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan pengetahuan dan pendidikan politik mulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga mulai dari orang tua, anak-anak. Pendidikan politik di lingkungan keluarga dipandang sangat urgen posisinya dalam menumbuhkan kesadaran, pemahaman dan tindakan politik seseorang. Karena dalam keluarga, secara tidak langsung seseorang akan belajar nilai-nilai kepemimpinan, ketaatan, kebaikan dan musyawarah yang kemudian berafiliasi pada tindakan serta aktivitas politiknya dalam kehidupan sosial masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain peran orang tua, suasana penuh cinta kasih, keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga juga dianggap sangat penting perannya dalam menumbuhkan integritas, jiwa sosial dan politik anak mereka. Sebab anak yang dididik dalam keluarga yang penuh dengan cinta kasih, akan terbentuk sebuah karakter yang baik dalam kehidupan mereka, Tapi sebaliknya, anak yang dididik dalam keluarga yang penuh kekerasan akan cenderung

mentransformasikan sikap kekerasan tersebut dalam karakternya, serta perilaku sosial dan politiknya. Melalui pendidikan politik yang baik di keluarga diharapkan akan melahirkan insane-insan yang sadar politik, peduli dan empati terhadap sesama, lingkungan serta bangsa dan negara.

Agen kedua adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Selain keluarga, sekolah dianggap sebagai agen penting dan paling efektif dalam memberikan pendidikan politik yang akan memberi dampak positif terhadap partisipasi politik seseorang untuk menunjang tumbuhnya pembangunan politik bangsa. Seorang guru dapat memberikan kesadaran politik dengan cara mendorong siswa untuk terlibat dalam pemilihan pengurus kelas atau ketua OSIS, mendorong agar siswa berani menyampaikan pendapat, mengarahkan siswa untuk ikut mengamalkan pelaksanaan tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Dengan tindakan-tindakan dan arahan yang sederhana ini, secara tidak langsung akan membentuk arah dan orientasi politik peserta didik yang notabene adalah generasi muda penerus bangsa dalam partisipasi politik secara lebih luas yakni dalam kehidupan bernegara.

Media massa menjadi agen dalam mempublikasikan aktivitas-aktivitas politik dan kenegaraan bagi masyarakat luas, berperan penting dalam membentuk opini

politik masyarakat termasuk generasi muda.

Sebagai generasi muda yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa, mereka dituntut untuk memiliki pemahaman yang benar tentang politik serta berpartisipasi aktif dalam politik itu sendiri. Sebab partisipasi politik menentukan seberapa besar pengaruhnya terhadap setiap pengambilan keputusan/kebijakan pemerintah.

Realita yang demikian memberi pengaruh pada kurang bertumbuhnya pembangunan politik yang ada di Distrik Yalengga. Partisipasi politik generasi muda cenderung hanya ikut-ikutan saja dan belum memiliki pendirian politik yang kuat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik generasi muda di Distrik Yalengga Kabupaten Jayawijaya masih rendah, sehingga tidak memberi pengaruh signifikan pada pembangunan politik.
2. Rendahnya partisipasi politik generasi muda di Distrik Yalengga disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan politik mereka.
3. Keluarga, sekolah dan media massa tidak berperan aktif dalam memberikan pendidikan dan

pengetahuan politik bagi generasi muda.

Selanjutnya, beberapa rujukan yang bisa dikemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah yang ada di Distrik Yalengga mengoptimalkan perannya untuk mendorong kesadaran dan partisipasi politik generasi muda.
2. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat, dalam hal ini orang tua pun harus ikut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda dengan menumbuh kembangkan pendidikan karakter yang mengandung nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan integritas..
3. Peningkatan pendidikan formal perlu diusahakan sehingga generasi muda mampu berpikir logis dan rasional, memiliki bekal potensi diri, kreatifitas dan juga produktifitas diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan Gafar. 1991. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hungtington, S. 1999. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Yayasan Dian Rama.
- Joan Nelson dan Samuel P. Hunington. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'oed. 2009. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ndraha, Taliziduhun. 2007. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Yayasan karya.
- Pye, Lucian W. 1991. *Pengertian Pembangunan Politik* dikutip oleh Juwono Sudarsono. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarsono, Juwono. 1992. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.